



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 104 TAHUN 2021 TENTANG RINCIAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022

(dalam ribuan rupiah)

NO	KOMPONEN ANGGARAN PENDIDIKAN	ALOKASI
1.	Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat	213.363.425.444
1.1	Anggaran Pendidikan pada Kementerian Negara/Lembaga	159.400.580.217
1.1.1	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	79.618.066.899
1.1.2	Kementerian Agama	55.858.770.498
1.1.3	Kementerian Keuangan	3.244.680.762
1.1.4	Kementerian Pertanian	396.689.864
1.1.5	Kementerian Perindustrian	969.000.000
1.1.6	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	117.140.248
1.1.7	Kementerian Perhubungan	2.329.137.279
1.1.8	Kementerian Kesehatan	2.302.739.356
1.1.9	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	76.000.000
1.1.10	Kementerian Kelautan dan Perikanan	417.249.438
1.1.11	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.242.276.837
1.1.12	Kementerian Pemuda dan Olahraga	449.900.000
1.1.13	Kementerian Pertahanan	1.370.190.914
1.1.14	Kementerian Ketenagakerjaan	3.934.761.994
1.1.15	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	430.894.811
1.1.16	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	236.695.523
1.1.17	Kementerian Komunikasi dan Informatika	167.441.173
1.1.18	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	230.105.516
1.1.19	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	4.561.442.236
1.1.20	Kementerian Perdagangan	14.596.869
1.1.21	Kepolisian Negara Republik Indonesia	500.000.000
1.1.22	Badan Intelijen Negara	500.000.000
1.1.23	Kejaksaan Republik Indonesia	400.000.000
1.1.24	Badan Riset dan Inovasi Nasional	32.800.000
1.2	Anggaran Pendidikan pada BA BUN	53.962.845.227
2.	Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa	290.544.046.892
2.1	DTU yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	155.273.970.950
2.2	Dana Transfer Khusus	133.452.575.942
2.2.1	DAK Fisik	18.348.532.876
2.2.2	DAK Non Fisik	115.104.043.066
2.2.2.1	Tunjangan Profesi Guru ASND	51.990.474.366
2.2.2.2	Tambahan Penghasilan Guru ASND	1.684.280.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022

(dalam ribuan rupiah)

NO	KOMPONEN ANGGARAN PENDIDIKAN	ALOKASI
2.2.2.3	Bantuan Operasional Sekolah	53.911.435.000
2.2.2.4	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	4.193.759.100
2.2.2.5	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	225.000.000
2.2.2.6	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.280.207.000
2.2.2.7	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	167.600.000
2.2.2.8	Tunjangan Khusus Guru ASND di Daerah Khusus	1.651.287.600
2.3	Otsus yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	1.417.500.000
2.4	DID untuk bidang pendidikan	400.000.000
3.	Anggaran Pendidikan melalui Pembiayaan	117.377.579.000
3.1	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	20.000.000.000
3.2	Pembiayaan Pendidikan	97.377.579.000
	Jumlah	621.285.051.336

Keterangan:

Rincian Anggaran Pendidikan telah menampung pergeseran dari anggaran pendidikan pada BA BUN kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

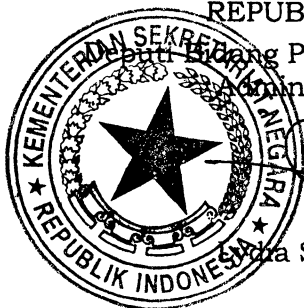
ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 104 TAHUN 2021 TENTANG RINCIAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

(Ribu Rupiah)

	ALOKASI PEMBIAYAAN ANGGARAN	840.226.322.190
1	Pembiayaan Utang	943.690.280.480
1.1	Surat Berharga Negara (Neto)	961.396.228.000
1.2	Pinjaman (Neto)	(17.705.947.520)
1.2.1	Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	1.753.633.803
1.2.1.1	Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	3.581.793.803
1.2.1.2	Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	(1.828.160.000)
1.2.2	Pinjaman Luar Negeri (Neto)	(19.459.581.323)
1.2.2.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	63.543.958.677
1.2.2.1.1	Pinjaman Tunai	28.700.000.000
1.2.2.1.2	Pinjaman Kegiatan	34.843.958.677
1.2.2.1.2.1	Pinjaman Kegiatan Pemerintah Pusat	31.265.858.978
1.2.2.1.2.1.1	Pinjaman Kegiatan Kementerian Negara/Lembaga	28.118.454.856
1.2.2.1.2.1.2	Pinjaman Kegiatan Diterushibahkan	3.147.404.122
1.2.2.1.2.2	Pinjaman Kegiatan kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah	3.578.099.699
1.2.2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri	(83.003.540.000)
2	Pembiayaan Investasi	(230.218.568.242)
2.1	Investasi Klaster Infrastruktur	(86.419.000.000)
2.1.1	Penyertaan Modal Negara kepada PT Utama Karya (Persero)	(23.850.000.000)
2.1.2	Penyertaan Modal Negara kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	(2.000.000.000)
2.1.3	Penyertaan Modal Negara kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	(1.085.000.000)
2.1.4	Penyertaan Modal Negara kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk	(3.000.000.000)
2.1.5	Penyertaan Modal Negara kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk	(1.976.000.000)
2.1.6	Penyertaan Modal Negara kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	(5.000.000.000)
2.1.7	Penyertaan Modal Negara kepada Perum Perumnas	(1.568.000.000)
2.1.8	Investasi kepada Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)	(28.840.000.000)
2.1.9	Investasi Pemerintah Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	(19.100.000.000)
2.2	Investasi Klaster Pendidikan	(20.000.000.000)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

(Ribu Rupiah)

2.2.1	Investasi kepada Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)	(20.000.000.000)
2.3	Investasi Klaster Perlindungan Masyarakat	(3.000.000.000)
2.3.1	Investasi kepada Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)/ <i>Pooling Fund</i> Bencana	(3.000.000.000)
2.4	Investasi Klaster Kerja Sama Internasional	(1.941.989.242)
2.4.1	Investasi kepada Badan Layanan Umum Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI)	(1.000.000.000)
2.4.2	Investasi kepada Islamic Development Bank (IsDB)	(82.849.068)
2.4.3	Investasi kepada International Finance Corporation (IFC)	(326.955.184)
2.4.4	Investasi kepada International Fund for Agricultural Development (IFAD)	(43.050.000)
2.4.5	Investasi kepada International Development Association (IDA)	(208.749.500)
2.4.6	Investasi kepada International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	(237.335.490)
2.4.7	Investasi kepada Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)	(43.050.000)
2.5	Cadangan Pembiayaan Investasi	(21.480.000.000)
2.6	Pembiayaan Pendidikan	(97.377.579.000)
3	Pemberian Pinjaman	585.472.952
3.1	Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah (Neto)	585.472.952
3.1.1	Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah (Bruto)	(3.578.099.699)
3.1.2	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman dari Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah	4.163.572.651
4	Kewajiban Penjaminan	(1.130.863.000)
4.1	Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional	(316.863.000)
4.1.1	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara	(5.786.000)
4.1.2	Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	(158.470.000)
4.1.3	Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman	(7.664.000)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

(Ribu Rupiah)

	Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara	
4.1.4	Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	(141.882.000)
4.1.5	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW (Infrastruktur Ketenagalistrikan)	(3.061.000)
4.2	Dukungan Penjaminan pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan	(814.000.000)
4.2.1	Penjaminan Pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN	(814.000.000)
4.2.1.1	Penjaminan <i>loss limit</i> UMKM	(814.000.000)
5	Pembiayaan Lainnya	127.300.000.000
5.1	Saldo Anggaran Lebih	127.300.000.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA



Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman